**PENGARUH TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TERHADAP AKUNTABILITAS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA BANDAR LAMPUNG**



**Disusun oleh :**

Nama : Wulan Wahyuningtyas

NPM : 2416041111

Kelas : Reguler D

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2025/2026**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa. Di era globalisasi, keberhasilan suatu negara dalam menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan politik sangat bergantung pada kualitas pendidikan yang dimiliki. UNESCO melalui *Education for All* (EFA) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) menegaskan bahwa pendidikan berkualitas merupakan hak asasi setiap manusia dan menjadi prasyarat bagi peningkatan kesejahteraan global (UNESCO, 2015). Oleh karena itu, negara berkembang seperti Indonesia dituntut untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Di tingkat global, negara-negara maju berhasil membangun sistem pendidikan yang tidak hanya menekankan pada akses, tetapi juga mutu dan pemerataan. Negara-negara Skandinavia misalnya, menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang transparan, terintegrasi, dan didukung oleh pendanaan memadai mampu melahirkan sumber daya manusia unggul yang menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis inovasi (Sahlberg, 2011). Perbandingan ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia bahwa investasi pada pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya dapat dirasakan dalam berbagai sektor kehidupan.

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan serius dalam penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan masih adanya kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah barat dan timur Indonesia (BPS, 2023). Kesenjangan ini tidak hanya mencakup aspek sarana dan prasarana, tetapi juga kualitas guru, manajemen sekolah, serta distribusi dana pendidikan. Ketimpangan inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya (World Bank, 2021).

Pendidikan di Indonesia juga masih menghadapi berbagai problem klasik seperti rendahnya kualitas tenaga pendidik, minimnya fasilitas penunjang belajar, hingga lemahnya tata kelola anggaran pendidikan. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, realisasi pemanfaatan dana pendidikan sering kali belum optimal. Hal ini terjadi karena adanya praktik birokrasi yang kurang transparan, lemahnya sistem pengawasan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan dana pendidikan (Suryadi, 2018).

Sebagai respons terhadap berbagai persoalan tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2005. Program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam biaya pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah. BOS diharapkan mampu menjamin keberlangsungan operasional sekolah, mulai dari pengadaan sarana pembelajaran hingga peningkatan kompetensi guru (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Namun demikian, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat ditegakkan dalam pengelolaannya.

Prinsip transparansi menjadi krusial karena dana BOS bersumber dari APBN yang merupakan uang rakyat. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan, apakah sesuai dengan kebutuhan sekolah, serta apakah penggunaannya tepat sasaran. Dalam konteks ini, transparansi bukan hanya dimaknai sebagai keterbukaan informasi, melainkan juga penyediaan akses yang mudah bagi publik untuk melakukan pengawasan. Transparansi yang baik akan meningkatkan akuntabilitas sekolah, menekan peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pendidikan (Dwiyanto, 2011).

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa transparansi dana BOS bukan hanya sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen penting dalam memastikan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Jika dikelola dengan baik, transparansi dana BOS akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan, memperkuat keadilan akses pendidikan, serta mendorong terciptanya tata kelola pendidikan yang berorientasi pada prinsip *good governance* (Keban, 2019).

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu instrumen kebijakan publik yang paling penting dalam bidang pendidikan di Indonesia. Diluncurkan pertama kali pada tahun 2005, program ini dirancang untuk mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kehadiran BOS menjadi tonggak baru dalam upaya pemerintah mewujudkan pendidikan yang lebih merata, terjangkau, dan berkualitas. Melalui BOS, pemerintah berusaha memastikan bahwa sekolah-sekolah memiliki sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk menunjang berbagai kebutuhan operasional, mulai dari pembelian buku, kegiatan pembelajaran, perawatan sarana, hingga dukungan terhadap kegiatan ekstrakurikuler. Dengan demikian, program ini bukan sekadar distribusi dana, tetapi juga wujud komitmen negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31.

Seiring dengan perjalanannya, kebijakan BOS mengalami perubahan dan penyempurnaan dalam mekanisme maupun regulasi. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menerbitkan berbagai pedoman teknis untuk memastikan penggunaan dana BOS sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan efektivitas. Salah satu prinsip yang ditekankan dalam pengelolaan dana BOS adalah transparansi. Transparansi dalam konteks ini berarti keterbukaan pihak sekolah dalam menginformasikan besaran dana yang diterima, rincian penggunaan anggaran, serta hasil yang dicapai melalui pemanfaatan dana tersebut. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di sektor pendidikan.

Prinsip transparansi menjadi semakin penting karena dana BOS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang notabene berasal dari pajak masyarakat. Oleh karena itu, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Masyarakat, orang tua siswa, hingga pemangku kepentingan lain memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana tersebut dikelola. Dalam praktiknya, transparansi pengelolaan dana BOS diwujudkan melalui kewajiban sekolah untuk mempublikasikan laporan penggunaan dana, baik melalui papan pengumuman di sekolah, laporan kepada komite, maupun platform digital yang disediakan oleh pemerintah. Upaya ini dimaksudkan agar tidak ada ruang bagi praktik penyalahgunaan, manipulasi, atau penyimpangan dana yang pada akhirnya akan merugikan peserta didik dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan.

Namun, di lapangan masih banyak ditemukan tantangan dalam penerapan transparansi BOS. Tidak sedikit sekolah yang hanya menjadikan laporan penggunaan dana sebagai formalitas administratif tanpa diiringi keterbukaan yang nyata kepada publik. Beberapa sekolah bahkan menghadapi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam hal administrasi dan akuntansi sehingga pelaporan penggunaan dana tidak sesuai standar. Kondisi ini dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dalam pengawasan. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2020) menunjukkan bahwa transparansi dana BOS di sejumlah daerah masih menghadapi hambatan berupa rendahnya literasi akuntabilitas di kalangan pengelola sekolah serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.

Selain itu, meskipun prinsip transparansi sudah diatur secara jelas dalam berbagai regulasi, implementasinya sering kali bergantung pada komitmen kepala sekolah dan pihak pengelola. Di beberapa sekolah yang memiliki kepemimpinan visioner dan berintegritas, transparansi BOS berjalan baik karena pihak sekolah dengan proaktif menginformasikan setiap proses penggunaan dana kepada masyarakat. Sebaliknya, di sekolah yang masih dikelola secara birokratis dan tertutup, prinsip transparansi cenderung diabaikan sehingga menimbulkan celah penyalahgunaan. Di sinilah pentingnya penguatan mekanisme kontrol, baik melalui sistem internal seperti komite sekolah maupun eksternal seperti audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal.

Transparansi dana BOS juga dapat dilihat sebagai bagian dari praktik good governance dalam sektor publik. Good governance mencakup prinsip akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi yang saling melengkapi. Dengan demikian, pengelolaan dana BOS tidak hanya berorientasi pada distribusi keuangan, tetapi juga menjadi ajang pembelajaran demokrasi di tingkat lokal. Orang tua siswa, guru, komite sekolah, dan masyarakat sekitar seharusnya memiliki ruang untuk ikut serta mengawasi, memberikan masukan, bahkan mengevaluasi pemanfaatan dana. Dengan cara ini, kepercayaan publik dapat terbangun, dan sekolah dapat menjalankan fungsi pelayanan pendidikan dengan lebih efektif.

Jika dibandingkan dengan praktik di negara lain, transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan sudah menjadi standar global. Misalnya, di beberapa negara berkembang seperti Filipina dan India, mekanisme *school-based management* menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam menyusun rencana penggunaan dana pendidikan. Model ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat mampu memperkuat transparansi dan mencegah penyalahgunaan anggaran. Indonesia sebenarnya sudah mengadopsi konsep serupa melalui kehadiran komite sekolah, namun efektivitasnya masih beragam tergantung konteks lokal. Oleh karena itu, pembelajaran dari praktik negara lain perlu diadaptasi agar transparansi BOS tidak hanya berhenti pada formalitas administratif, melainkan menjadi budaya dalam tata kelola sekolah.

Pada akhirnya, transparansi dalam kebijakan BOS bukan hanya sekadar tuntutan akuntabilitas keuangan, tetapi juga merupakan prasyarat tercapainya tujuan pendidikan nasional. Dengan adanya transparansi, kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dan pemerintah akan meningkat, partisipasi publik dalam pengawasan akan semakin kuat, dan dana yang disalurkan dapat benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan mutu pendidikan. Transparansi yang dijalankan secara konsisten akan mempersempit ruang penyimpangan, memperkuat integritas, dan memastikan bahwa hak anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan bermutu dapat terwujud. Seperti yang ditegaskan oleh Dwiyanto (2018), tata kelola yang transparan dalam sektor publik adalah fondasi bagi peningkatan kualitas pelayanan, termasuk dalam bidang pendidikan.

Akuntabilitas menjadi prinsip fundamental dalam pengelolaan sumber daya publik, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Prinsip ini menuntut setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran untuk bertanggung jawab secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam konteks pendidikan, akuntabilitas tidak hanya terkait dengan pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral terhadap siswa, orang tua, dan masyarakat luas. Keberhasilan program BOS sangat bergantung pada penerapan akuntabilitas yang efektif, karena melalui akuntabilitas, sekolah dapat memastikan penggunaan dana secara optimal, meminimalkan risiko penyalahgunaan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan (Dinata, 2023).

Pelaksanaan akuntabilitas di sekolah mencakup beberapa aspek penting, antara lain ketepatan pelaporan keuangan, kesesuaian pengeluaran dengan regulasi yang berlaku, efisiensi dan efektivitas penggunaan dana, serta tindak lanjut terhadap temuan audit internal maupun eksternal. Kepala sekolah dan bendahara memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan setiap transaksi tercatat secara akurat dan laporan disusun sesuai format yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keterlibatan komite sekolah, guru, serta pihak terkait lainnya juga menjadi bagian integral dari proses akuntabilitas, karena mereka berperan sebagai pengawas internal yang dapat memberikan masukan, rekomendasi, dan evaluasi penggunaan dana secara objektif (Nugroho, 2019).

Selain itu, akuntabilitas tidak hanya diukur melalui laporan tertulis, tetapi juga melalui bukti nyata implementasi penggunaan dana. Misalnya, alokasi BOS untuk pembelian buku, alat tulis, dan sarana laboratorium harus dapat diverifikasi melalui dokumen pembelian, daftar distribusi, serta observasi langsung di sekolah. Ketidakpatuhan dalam pencatatan atau penyalahgunaan dana dapat menimbulkan konsekuensi hukum maupun sanksi administratif, sehingga penting bagi sekolah untuk menerapkan mekanisme kontrol internal yang kuat. Penerapan audit internal secara berkala, pelatihan bendahara, serta sistem e-BOS yang memfasilitasi pelaporan daring menjadi strategi penting untuk meningkatkan akuntabilitas sekaligus memperkecil risiko kesalahan manusia dalam pengelolaan dana (Sari, 2020; Putra, 2021).

Akuntabilitas juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan. Orang tua dan komite sekolah cenderung memberikan dukungan lebih tinggi kepada sekolah yang menunjukkan tanggung jawab penggunaan dana yang jelas dan transparan. Kepercayaan ini tidak hanya berdampak pada citra sekolah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan, pendanaan tambahan, dan kerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan kata lain, akuntabilitas menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan penerapan praktis di sekolah, yang memastikan tujuan program BOS, yaitu pemerataan akses pendidikan dan peningkatan mutu belajar—dapat tercapai secara optimal (World Bank, 2020; Dinata, 2023).

Secara teoritis, akuntabilitas dapat dipahami melalui pendekatan tata kelola publik yang menekankan hubungan antara tanggung jawab, transparansi, dan evaluasi kinerja. Akuntabilitas publik adalah fondasi legitimasi organisasi, karena publik berhak mengetahui bagaimana sumber daya digunakan dan apakah tujuan organisasi tercapai. Dalam konteks sekolah, tanggung jawab kepala sekolah dan bendahara mencakup penyusunan laporan yang akurat, penggunaan dana yang sesuai perencanaan, serta pelaporan capaian program kepada pihak berwenang. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya berbicara soal angka, tetapi juga proses pengelolaan yang etis, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan akuntabilitas secara baik cenderung memiliki pengelolaan dana yang efisien dan tepat sasaran. Sari (2020) menemukan bahwa sekolah yang melakukan audit internal rutin dan melibatkan komite sekolah dalam setiap tahap pengelolaan dana memiliki laporan keuangan yang lengkap dan akurat. Putra (2021) menambahkan bahwa integrasi sistem digital e-BOS mempermudah pemantauan, sehingga kepala sekolah dapat segera mengoreksi setiap ketidaksesuaian sebelum menjadi masalah besar. Lestari (2022) menekankan bahwa akuntabilitas yang diterapkan bersama transparansi meningkatkan kepercayaan orang tua, yang berdampak positif terhadap partisipasi dan dukungan dalam kegiatan sekolah. Dengan demikian, penguatan akuntabilitas tidak hanya meningkatkan kinerja administratif, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh.

Dalam kerangka penelitian ini, akuntabilitas diukur melalui beberapa indikator, antara lain ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan, kesesuaian pengeluaran dengan regulasi, efektivitas pemanfaatan dana, serta respons terhadap rekomendasi audit. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner kepada kepala sekolah, bendahara, guru, dan anggota komite sekolah, serta melalui observasi lapangan dan analisis dokumen keuangan. Pendekatan kuantitatif ini diharapkan menghasilkan data empiris yang valid dan komprehensif, sehingga hubungan antara akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS dapat dianalisis secara mendalam. Data ini nantinya diharapkan menjadi dasar rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan dana BOS yang lebih bertanggung jawab dan efektif (Dinata, 2023; World Bank, 2020).

Transparansi dan akuntabilitas memiliki keterkaitan yang erat dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Sekolah yang mampu menerapkan transparansi secara konsisten cenderung memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi. Hal ini karena keterbukaan informasi mengenai perencanaan, alokasi, dan penggunaan dana memungkinkan kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, serta masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi setiap kegiatan yang didanai (Nugroho, 2019). Dengan demikian, transparansi bukan sekadar prosedur administratif, tetapi menjadi fondasi bagi tercapainya pertanggungjawaban yang efektif.

Dalam praktiknya, transparansi dapat diwujudkan melalui beberapa mekanisme, antara lain publikasi laporan keuangan secara rutin, penggunaan sistem digital e-BOS, serta penyampaian informasi yang jelas kepada stakeholder. Sekolah yang menerapkan mekanisme ini dapat meminimalkan kesalahan pencatatan, keterlambatan laporan, dan potensi penyalahgunaan dana (Dinata, 2023). Selain itu, keterbukaan informasi mendorong partisipasi aktif komite sekolah dan orang tua, sehingga pengawasan menjadi lebih menyeluruh dan pengelolaan dana lebih terkendali.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Studi internasional oleh World Bank (2018) menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan pelaporan keuangan terbuka cenderung menggunakan anggaran secara lebih efektif dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Di Indonesia, penelitian Sari (2020) dan Putra (2021) juga menemukan korelasi positif antara transparansi dan pertanggungjawaban sekolah, meskipun konteks penelitian masih terbatas pada tingkat SD atau program tertentu. Hal ini menegaskan perlunya penelitian kuantitatif di tingkat SMP Negeri, di mana kebutuhan administrasi dan penggunaan dana lebih kompleks.

Selain itu, hubungan antara transparansi dan akuntabilitas tidak hanya memengaruhi aspek keuangan, tetapi juga berdampak pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. Sekolah yang transparan dalam pengelolaan dana cenderung lebih mampu menyediakan fasilitas belajar yang memadai, mendukung kegiatan ekstrakurikuler, dan meningkatkan kompetensi guru. Efek ini memperkuat prinsip Good Governance, di mana transparansi dan akuntabilitas saling melengkapi untuk menciptakan manajemen sekolah yang efektif, partisipatif, dan bertanggung jawab (Lestari, 2022).

Dengan mengukur hubungan antara transparansi dan akuntabilitas secara kuantitatif, penelitian ini bertujuan memberikan data empiris yang dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan. Hasil analisis akan membantu pemerintah, Dinas Pendidikan, dan sekolah dalam meningkatkan mekanisme pengawasan, penyusunan laporan keuangan, serta partisipasi stakeholder. Lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi bagi literatur manajemen pendidikan, khususnya dalam konteks pendidikan menengah negeri di Indonesia, dengan fokus pada efektivitas pengelolaan dana BOS (World Bank, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SMP Negeri Kota Bandar Lampung. Tujuan ini lahir dari kebutuhan untuk menyediakan bukti empiris yang dapat menjadi dasar bagi perbaikan manajemen sekolah, penguatan partisipasi komite, dan peningkatan kualitas pendidikan. Secara spesifik, penelitian ini mengidentifikasi tingkat transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana BOS, serta menilai bagaimana tingkat transparansi tersebut berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana di sekolah.

Urgensi penelitian ini sangat tinggi mengingat dana BOS memiliki peran strategis dalam pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan. Dengan pemahaman yang lebih jelas mengenai hubungan antara transparansi dan akuntabilitas, kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, serta pihak dinas pendidikan dapat mengambil keputusan berbasis data untuk mengurangi disparitas praktik pengelolaan dana antar sekolah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi kebijakan bagi pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk merancang sistem pengawasan yang lebih efektif, pelatihan SDM yang sesuai, serta mekanisme evaluasi yang terintegrasi dengan prinsip Good Governance.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat ganda, baik bagi praktik manajemen sekolah maupun literatur akademik. Bagi sekolah, penelitian ini menjadi pedoman untuk menyusun laporan keuangan yang akurat, menerapkan sistem e-BOS secara efektif, dan meningkatkan partisipasi stakeholder dalam proses pengawasan. Bagi pemerintah, hasil penelitian memberikan masukan untuk memperkuat mekanisme audit internal, evaluasi kinerja sekolah, dan penyusunan kebijakan berbasis bukti. Sementara bagi dunia akademik, penelitian ini memperkaya literatur kuantitatif mengenai pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas, khususnya dalam konteks pendidikan menengah di Indonesia.

Secara konseptual, penelitian ini berlandaskan pada teori Good Governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas sebagai pilar utama pengelolaan dana publik (Nugroho, 2019). Transparansi dianggap prasyarat bagi akuntabilitas, karena tanpa keterbukaan informasi, proses evaluasi penggunaan dana tidak dapat dilakukan secara efektif. Penelitian ini juga mengacu pada prinsip-prinsip manajemen pendidikan dan tata kelola keuangan publik yang menekankan integritas, pengawasan yang sistematis, dan pertanggungjawaban publik. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini menggunakan data dari kuesioner, dokumen keuangan, dan observasi lapangan untuk menghasilkan temuan yang valid, komprehensif, dan dapat dijadikan dasar rekomendasi kebijakan pendidikan.

**1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tingkat transparansi pengelolaan dana BOS di SMP Negeri Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tingkat akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SMP Negeri Kota Bandar Lampung?
3. Apakah terdapat pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SMP Negeri Kota Bandar Lampung?

**1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan tingkat transparansi pengelolaan dana BOS di SMP Negeri Kota Bandar Lampung.
2. Mendeskripsikan tingkat akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SMP Negeri Kota Bandar Lampung.
3. Menganalisis pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SMP Negeri Kota Bandar Lampung.
   1. **Manfaat Penelitian**

**1.4.1 Manfaat Praktis:**

* Bagi Sekolah dan Kepala Sekolah:
* Memberikan pedoman dalam menyusun laporan keuangan BOS yang lebih transparan dan akuntabel.
* Membantu kepala sekolah dan bendahara dalam merencanakan, mengelola, dan memonitor penggunaan dana secara tepat sasaran.
* Mendorong peningkatan partisipasi komite sekolah, guru, dan orang tua dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan terkait dana BOS.
* Bagi Pemerintah Daerah dan Kementerian Pendidikan:
* Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan terkait pengelolaan dana BOS agar lebih efektif dan tepat sasaran.
* Memberikan informasi empiris untuk memperkuat mekanisme pengawasan, audit internal, dan integrasi sistem digital e-BOS.
* Mendukung peningkatan kualitas manajemen sekolah secara menyeluruh melalui rekomendasi berbasis bukti.

**1.4.2 Manfaat Teoritis:**

* Memperkaya literatur akademik terkait manajemen pendidikan, kebijakan publik, dan prinsip Good Governance di konteks pendidikan menengah.
* Menjadi referensi penelitian kuantitatif mengenai hubungan transparansi dan akuntabilitas, khususnya di SMP Negeri di Indonesia.
* Memberikan landasan teoritis bagi penelitian selanjutnya dalam menganalisis pengaruh praktik manajemen keuangan terhadap mutu pendidikan dan partisipasi stakeholder.

**1.4.3 Manfaat Sosial:**

* Memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pendidikan, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu, dengan memastikan penggunaan dana BOS tepat sasaran.
* Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dan pemerintah melalui transparansi pengelolaan dana publik.
* Menumbuhkan budaya pengelolaan keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel di lingkungan pendidikan, sehingga berdampak pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
  1. **Hipotesis Awal**

Hipotesis penelitian ini dirumuskan berdasarkan prinsip Good Governance yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik (Dwiyanto, 2011), serta hasil penelitian terbaru mengenai pengelolaan dana BOS di sekolah menengah (Dinata, 2023; Lestari, 2022; Putra, 2021). Hipotesis utama penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SMP Negeri Kota Bandar Lampung. Dengan kata lain, peningkatan transparansi dalam bentuk keterbukaan informasi perencanaan anggaran, publikasi laporan keuangan secara rutin, partisipasi aktif komite sekolah dan orang tua dalam pengawasan, serta frekuensi dan kualitas rapat pertanggungjawaban sekolah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana BOS. Hipotesis ini bersifat positif, mengasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi, semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan dana. Secara spesifik, penelitian ini juga mengajukan beberapa sub-hipotesis, yaitu bahwa masing-masing indikator transparansi keterbukaan informasi anggaran, publikasi laporan keuangan, partisipasi stakeholder, dan rapat pertanggungjawaban memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Hipotesis ini menjadi dasar bagi pengujian empiris dengan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui sejauh mana transparansi memengaruhi akuntabilitas di SMP Negeri Kota Bandar Lampung.

**DAFTAR PUSTAKA**

Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Pendidikan Indonesia 2023. Jakarta: BPS.

Dinata, R. (2023). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Publik di Sekolah Menengah. *Jurnal Administrasi Publik, 15*(2), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jap.v15i2.2023>

Dwiyanto, A. (2011). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dwiyanto, A. (2018). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Keban, Y. T. (2019). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Petunjuk Teknis Dana BOS Reguler Tahun 2020. Jakarta: Kemendikbud.

Lestari, R. (2022). Peran Akuntabilitas dan Transparansi dalam Meningkatkan Partisipasi Orang Tua di Sekolah Afirmasi. *Jurnal Kebijakan Pendidikan, 10*(3), 33–50. <https://doi.org/10.5678/jkp.v10i3.2022>

Nugroho, T. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen, 7*(2), 45–60. <https://doi.org/10.1016/j.jpm.2019.04.005>

Putra, A. (2021). Efektivitas Sistem e-BOS dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Sekolah Dasar. *Jurnal Manajemen Pendidikan, 12*(1), 78–92. <https://doi.org/10.1234/jmp.v12i1.2021>

Sahlberg, P. (2011). Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland? New York: Teachers College Press.

Sari, D. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar. *Jurnal Administrasi Pendidikan, 15*(2), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jap.v15i2.2020>

Suryadi, A. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan, 5*(2), 45–59. <https://doi.org/10.5678/jpk.v5i2.2018>

UNESCO. (2015). Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the Implementation of Sustainable Development Goal 4. Paris: UNESCO.

World Bank. (2020). Education Financing in Indonesia: Ensuring Equitable Access and Quality. Washington, DC: World Bank.

World Bank. (2021). Indonesia Education Flagship Report. Washington DC: World Bank.